

APA KABAR PENERAPAN *RESOURCE DESCRIPTION AND ACCES* (RDA) DI INDONESIA?

Irham Hanif Nabawi¹

Pustakawan Muda pada Sub Direktorat Bibliografi
Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI
hanif_irham@yahoo.com

Abstrak

Hingga saat ini, kebijakan penerapan RDA di Indonesia sudah bergulir lebih dari empat tahun, semenjak diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) pada bulan Agustus tahun 2015. Penyusunan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dasar dalam penerapan *Resource Description and Access (RDA)* sebagai peraturan pengatalogan bahan perpustakaan di Indonesia. Artikel ini mencoba menjawab kondisi terkini penerapan RDA di Indonesia yang digawangi oleh Perpusnas. Jika menilik dari berlakunya kebijakan hingga 2020, maka masih tersisa satu tahun bagi Perpusnas untuk mencapai target yang diharapkan dalam proses penerapan RDA di Indonesia.

Kata Kunci: Pengolahan Koleksi, *Resource Description and Access (RDA)*, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, kebijakan penerapan *Resource Description and Access (RDA)* di Indonesia sudah bergulir lebih dari empat tahun, semenjak diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) pada bulan Agustus tahun 2015. Penyusunan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dasar dalam penerapan RDA di Indonesia sebagai peraturan baru pengatalogan bahan perpustakaan yang menggantikan *Anglo American Cataloguing Rules edition 2 (AACR2)*.

Telah banyak tahapan yang dilakukan oleh Perpusnas dalam rangka menerapkan RDA di Indonesia, tahun 2019-2020 merupakan tahap penguatan jaringan kerjasama pengatalogan bahan perpustakaan. Semestinya pada tahap ini sudah terbentuk Katalog Induk Nasional (KIN) yang berbasis RDA, terciptanya kerjasama pengolahan bahan pustaka (*copy cataloguing*), dan terjalannya

interoperabilitas katalog berbasis RDA antarperpustakaan se-Indonesia. (Perpustakaan Nasional RI, 2015:24).

Sejauh manakah keberhasilan penerapan RDA yang menggantikan AACR2 dilakukan oleh Perpustakaan Nasional berdasarkan tahapan yang dilakukan? Artikel ini mencoba menjawab kondisi terkini dan kendala apa saja yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI dalam melakukan penerapan RDA di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Apa itu RDA?

Chris Oliver dalam bukunya “*Introducing RDA : a guide to the basics*”. Dalam tulisannya dikemukakan bahwa *Resource Description and Access* (RDA) merupakan standar katalog baru yang menggantikan *Anglo American Cataloguing Rules edition 2* (AACR2). Meskipun memiliki tautan yang kuat ke AACR2, RDA sangat berbeda karena didasarkan pada kerangka teoritis, ia dirancang untuk lingkungan digital, dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada AACR2.

Selanjutnya *Oliver* mengatakan bahwa Seperti AACR2, RDA terdiri dari serangkaian instruksi praktis. Namun, RDA didasarkan pada kerangka teoritis yang mendefinisikan bentuk, struktur, dan konten dari standar baru. Kunci untuk memahami RDA adalah keselarasannya dengan dua model konseptual, *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR) dan *Functional Requirements for Authority Data* (FRAD). FRAD adalah perpanjangan dari model FRBR. Model-model tersebut adalah cara untuk memahami bibliografi universal.

Adapun yang dimaksud dengan RDA dirancang untuk lingkungan digital menurut *Oliver* adalah perubahan dalam lingkungan katalogisasi antara 1960-an dan 2000-an sangat besar, bukan hanya karena penyebaran cepat dari jenis publikasi baru, bentuk konten baru, dan media baru untuk konten, tetapi juga karena perpindahan ke lingkungan jaringan online yang telah secara kualitatif mengubah cara perpustakaan dan penggunanya melakukan pekerjaan mereka.

Oliver menyebutkan bahwa RDA bukan hanya untuk perpustakaan. RDA dirancang oleh komunitas perpustakaan untuk penggunaannya, tetapi salah satu tujuannya adalah bahwa RDA juga harus “mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas lain”. Salah satu fitur yang disebutkan di atas adalah fleksibel dan kerangka kerja yang dapat diperluas yang memungkinkan untuk

deskripsi semua jenis sumber informasi, baik koleksi perpustakaan tradisional, atau sumber informasi dari komunitas warisan budaya lain, seperti arsip, museum, atau repositori digital. Kemungkinan menggunakan RDA dalam konteks yang lebih luas juga jelas dalam definisi sebagai standar "konten", dan kemampuan beradaptasi untuk digunakan dalam konteks internasional.

Perbedaan AACR2 dan RDA

Perbedaan apa saja sih yang termuat antara AACR2 dengan RDA? Dari beberapa literatur yang dibaca, diantaranya Fahrul Rozi (2012) mengungkapkan perbedaan AACR2 dan RDA sebagai berikut: *Pertama*, pada struktur AACR2 khusus mendeskripsikan bahan-bahan pustaka tertentu yang telah dirumuskan dalam AACR2, seperti buku, manuskrip, kartografi dan lain-lain, sementara itu RDA dirumuskan tidak untuk bahan-bahan tertentu, tetapi semua objek yang dalam pendeskripsian bahan pustaka. *Kedua*, dalam pendeskripsian bahan pustaka AACR2 mengidentifikasi berpedoman pada delapan daerah publikasi, tetapi RDA memakai pedoman yang fleksibel yang dinamakan *core element*. *Ketiga*, kategori dari sumber atau bahan deskripsi yang selama ini dipakai AACR2, yakni GMD tidak mendeskripsikan bahan deskripsi secara jelas, sementara itu RDA memakai tiga kategori dalam mengategorikan bahan deskripsi, yakni *media type*, *carrier type* dan *content type*. *Keempat*, singkatan yang selama ini dipakai oleh AACR2 seperti dkk.,ill.,ed., dan lainnya tidak dapat dipakai oleh RDA.

Sementara Suharyanto dalam tulisannya "Kajian komparatif atas penggunaan AACR2 dan RDA dalam format MARC21 terhadap bahan perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI" menyimpulkan bahwa adanya perbedaan baik dari segi fisik/isi secara keseluruhan maupun perbedaan dalam pengatalogan deskriptif dan penentuan titik akses, sebagai berikut:

- a. AACR2 diterbitkan hanya dalam bentuk tercetak. Sedangkan RDA diterbitkan dalam dua versi, yaitu tercetak dan web.
- b. Struktur AACR2 terdiri dari dua bagian: deskripsi bibliografis, tajuk, judul seragam, dan referensi, sedangkan RDA terdiri dari tiga: *resource description* (sumber deskripsi), *relationship* (hubungan), *access point control* (pengendalian titik akses).

- c. Tingkatan deskripsi AACR2 dibagi menjadi delapan daerah deskripsi. Sedangkan RDA mempunyai 13 elemen inti deskripsi.
- d. AACR2 menggunakan kategori sumber berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Sedangkan RDA tidak lagi mengatur tentang jenis bahan perpustakaan namun digantikan dengan *content type* (jenis isi), *media type* (jenis media), dan *carrier type* (jenis bawaan/sumber).
- e. Dalam AACR 2 untuk pernyataan judul sebenarnya diikuti dengan *General Material Designation* (GMD) pernyataan bahan umum. RDA tidak lagi menggunakan GMD tetapi digantikan dengan ruas 336, 337, dan 338. Ruas 336 merupakan *content type* (RDA 6.9) jenis isi “apa isinya?”. Ruas 337 merupakan *media type* (RDA 3.2) jenis media “bagaimana menyimpannya?”. Dan ruas 338 *carrier type* (RDA 3.3) jenis bawaan/sumber “dimana disimpannya?”
- f. Penulisan untuk daerah edisi ruas 250. AACR 2 dalam penulisan daerah edisi ruas 250 menggunakan singkatan sedangkan RDA tidak lagi mengenal singkatan. Sedangkan di dalam RDA penulisan sesuai apa yang tertera dalam sumber informasi.
- g. Penulisan untuk daerah penerbitan AACR 2 mengatur penggunaan singkatan [s.l.] untuk tempat terbit yang tidak diketahui dan [s.n.] untuk nama penerbit yang tidak diketahui. Singkatan tersebut di dalam RDA digantikan dengan istilah [*place of publication not identified*] dan [*publisher not identified*] atau [tempat terbit tidak teridentifikasi] dan [penerbit tidak teridentifikasi].
- h. Penulisan untuk daerah deskripsi fisik. Penulisan deskripsi fisik halaman dan keterangan ilustrasi di dalam AACR 2 menggunakan singkatan sedangkan di dalam RDA ditulis apa adanya tanpa disingkat, kecuali cm.
- i. Perbandingan AACR 2 dan RDA dalam penentuan titik akses atau penentuan tajuk entri utama dan tajuk entri tambahan. AACR 2 pada aturan 1.1F5 mengatur untuk menggunakan “[et al.]” untuk karya perorangan/badan korporasi lebih dari 3. Sedangkan RDA pada peraturan 2.4.1.5 untuk mencantumkan semua nama perorangan/badan yang bertanggung jawab atas suatu karya. Beri keterangan penjelasan untuk masing-masing orang/badan. Namun demikian RDA juga memberikan pilihan lain yaitu cukup cantumkan satu nama “[dan...pengarang lain].”

Pembahasan perbedaan RDA dan AACR2 dari Fahrul Rozi dan Suharyanto di atas hanya melihat sisi teknis pengolahan sumber informasi saja, sehingga terkadang pustakawan dan stakeholder lainnya menganggap perubahan standar pengatalogan dari AACR2 ke RDA tidak terlalu *urgent*.

Namun sejatinya perubahan standar pengatalogan dari AACR2 menuju RDA merupakan perubahan paradigma terhadap pendekatan informasi. Berbeda dengan AACR2 yang mengelola sumber informasi berdasarkan karakteristik fisiknya, RDA justru mengelola sumber informasi berdasarkan perilaku pemustaka (pengguna) dalam memilih, mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Sebagaimana Keenan (2014) kemukakan bahwa RDA dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip, model, dan standar yang ditetapkan secara internasional. RDA dirancang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran pengguna, menggunakan istilah yang dapat dimengerti oleh khalayak luas. RDA menjadi kerangka kerja yang lebih konsisten dan fleksibel dalam menggambarkan semua jenis sumber informasi, baik koleksi berbasis fisik atau non-fisik. RDA dirancang untuk bekerja dengan aplikasi format perpustakaanseperti format metadata terbaca mesin untuk data bibliografi (MARC), format umum untuk pertukaran data melalui internet seperti bahasa *extensible markup* (XML) dan struktur data baru yang belum dikembangkan.

“*RDA and the Copy Cataloger*” adalah judul penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Miloche Kottman (2012). Penelitian ini memberikan ulasan mengenai pengembangan RDA dengan menggambarkan bagaimana upaya Universitas Kansas mempersiapkan dan melatih para ‘*copy-cataloger*’ dalam menangani bibliografi RDA dan *record* otoritas selama periode uji coba RDA (1 Oktober 2010 – 1 Januari 2011) dan rencananya pelatihan terus dilaksanakan sampai memasuki masa penerapan secara penuh.

Selanjutnya Duchave dan Penington (2017) dalam penelitiannya *Resource Description and Access in Europe: Implementations and perceptions*, mengeksplorasi mengenai persepsi dan implementasi standar katalogisasi RDA yang menggantikan AACR2 yang melibatkan 12 perpustakaan nasional di wilayah Eropa. Penelitian ini mengungkapkan Perpustakaan Nasional di Eropa menunjukkan tingkat keterlibatan dan minat yang lebih tinggi dalam pengembangan RDA dan keinginan yang lebih kuat untuk bekerja menuju *interoperabilitas* dan penyelarasan RDA dengan sektor warisan budaya. Implementasi di Eropa mendukung internasionalisasi

RDA dengan secara aktif mencari solusi untuk masalah-masalah dalam standar pengatalogan baru yang timbul dari keanekaragaman budaya dan bahasa.

3. METODE PENELITIAN

Landasan teoritis yang digunakan pada tulisan ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Menurut Sugiyono (2016:291), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas yaitu berkaitan dengan RDA dan penerapannya di beberapa negara kemudian penulis hubungkan dengan kondisi penerapan RDA di Indonesia.

4. PEMBAHASAN

Kondisi Penerapan RDA di Indonesia

Melihat pada perjalanan *National Library Board* Singapura dalam melakukan penerapan RDA yang memerlukan waktu hanya satu tahun. Proyek penerapan RDA di Singapura dimulai pada Bulan Mei 2012 sampai Bulan April 2013 (Choi, 2013:1). Perpustakaan nasional negeri tetangga tersebut melakukan empat tahapan dalam menerapkan RDA, yaitu: pembentukan tim RDA (Mei 2012), uji coba RDA (Desember 2012), peluncuran awal (Maret 2013), peluncuran resmi (April 2013). Proses perjalanan penerapan RDA pada NLB Singapura berlangsung secara *smooth*. Hal ini dikarenakan ketepatan dalam menyusun perencanaan dan strategi sehingga penerapan RDA di Perpustakaan Nasional Singapura berlangsung dengan sukses.

Berbicara mengenai sejauh mana proses penerapan RDA di Indonesia telah dilakukan dan dikawal oleh Perpustakaan Nasional maka harus melihat dan berpedoman pada langkah atau program apa saja yang telah dilakukan, waktu pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Untuk itu penulis mencoba memaparkan program dan tahapan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dari mulai diterbitkannya kebijakan pada tahun 2015 hingga saat ini.

Berdasarkan buku “Kebijakan Penerapan *Resource Description and Access* (RDA) di Indonesia” yang terbit tahun 2015. Perpustakaan Nasional melakukan penyusunan

beberapa kegiatan, program dan tahapan yang dilakukan dalam rangka menerapkan RDA di Indonesia, yaitu:

1) Penyusunan Pedoman Penerapan RDA

Pedoman penerapan RDA merupakan acuan yang digunakan dalam melakukan pengatalogan berbasis RDA. Panduan ini berisikan pedoman dalam menetapkan sumber deskripsi, keterkaitan antara sumber satu dengan yang lainnya, titik akses, serta penerapannya dalam format MARC. Dengan pedoman ini diharapkan pustakawan dapat memahami dan mampu menerapkan RDA sesuai standar pengatalogan RDA secara lebih praktis dan mudah.

Adapun waktu penyusunannya dijadwalkan selesai pada tahun 2015, dengan tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait penyusunan Pedoman RDA, melalui FGD
- b. Perbaikan naskah pedoman RDA
- c. Seminar naskah pedoman penerapan RDA
- d. Finalisasi naskah pedoman penerapan RDA
- e. Penerbitan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI penerapan RDA

2) Sosialisasi RDA

Sosialisasi merupakan proses transfer kebiasaan atau aturan dari penggunaan peraturan pengatalogan AACR2 ke RDA, dari satu atau kelompok orang kepada orang atau atau kelompok lainnya dengan harapan mau mengikuti apa yang telah dilakukan mereka sebelumnya.

Sosialisasi dilakukan melalui:

- a. Mengeluarkan Surat Edaran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI tentang Kebijakan Penerapan RDA;
- b. Rapat koordinasi dengan mengundang *stakeholder* perpustakaan;
- c. Sosialisasi melalui media masa;
- d. Sosialisasi melalui rapat, seminar, *workshop*;
- e. Sosialisasi melalui web Perpustakaan Nasional
- f. Sosialisasi secara langsung, seperti: pertemuan pustakawan, organisasi profesi, dan melalui media sosial.

Kegiatan sosialisasi penerapan RDA hanya dilaksanakan pada tahun 2016, dengan tahapan yang dilakukan sebagai berikut: penggantian naskah; sosialisasi pedoman penerapan RDA; penerapan RDA sebagai standar baru pengatalogan bahan perpustakaan.

3) Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan

Teknologi informasi merupakan sarana yang canggih dan memadai dalam penerapan RDA. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan aplikasi perpustakaan dari yang telah ada agar dapat menyesuaikan dengan penerapan RDA. Sistem harus memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi dan mampu memfasilitasi penerapan RDA.

Pengembangan sistem aplikasi *Integrated Library and Information System* (INLIS) berbasis RDA dikembangkan pada tahun 2015. Diharapkan dengan pengembangan sistem aplikasi perpustakaan INLIS yang *open source* akan mempercepat penerapan RDA di Indonesia.

4) Pengembangan Kompetensi Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan yang mengelola sistem aplikasi maupun yang melakukan pengatalogan berbasis RDA harus memiliki kompetensi yang memadai. Pengembangan kompetensi tersebut, akan dilakukan melalui:

- a. Diklat RDA oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2016 sebanyak 60 orang
- b. Koordinasi dengan asosiasi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perpustakaan dalam menyusun kurikulum pengatalogan berbasis RDA
- c. Diklat RDA dapat dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara program ilmu perpustakaan
- d. Workshop RDA dapat dilakukan oleh organisasi profesi
- e. Magang di Perpustakaan Nasional RI
- f. Bimbingan teknis RDA di Perpustakaan Nasional
- g. TOT RDA di Perpustakaan Nasional tahun 2017

Semua kegiatan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan dilakukan 2016-2020.

5) Penguatan Jaringan Kerjasama Pengatalogan Bahan Perpustakaan

Perpustakaan Nasional sebagai pusat jejaring dan membuat Katalog Induk Nasional (KIN), akan memperkuat jaringan kerjasama pengatalogan dengan harapan

KIN dapat terwujud dengan optimal dalam pangkalan data, sehingga akan memudahkan bagi pengatalog untuk menyalin katalog yang sudah ada, dan berdampak akan lebih cepat dan efisien dalam mengolah bahan perpustakaan.

Kerjasama dalam pengatalogan ini dapat dimulai dari membentuk suatu forum pengatalog, atau melalui komitmen antarlembaga sebagai suatu tempat berdiskusi di antara para tenaga perpustakaan yang melakukan pengatalogan bahan perpustakaan. Kelebihan dari jaringan ini adalah penyebarluasan materi RDA yang dapat menekan biaya dan dapat membentuk kesamaan persepsi atas RDA.

Kegiatan Penguatan Jaringan Kerjasama Pengatalogan Bahan Perpustakaan dijadwalkan berlangsung dari tahun 2016-2020, dengan target capaian sebagai berikut: Katalog Induk Nasional berbasis RDA, Kerjasama pengolahan bahan perpustakaan (*Copy Cataloguing*), dan *Interoperabilitas* katalog berbasis RDA antarperpustakaan se-Indonesia.

Penulis perhatikan bahwa sebenarnya pada awal berkembangnya isu perubahan pedoman AACR2 ke RDA tahun 2010, Perpusnas memberikan perhatian yang cukup serius terhadap isu tersebut. Hal ini terbukti dengan tindakan Perpusnas mengirimkan pejabat dan pustakawan untuk melakukan studi banding ke *National Library of Australia* (NLA) dalam dua gelombang untuk menjajaki kemungkinan diterapkannya RDA di Indonesia. Sampai lahirnya Kebijakan Penerapan RDA di Indonesia pada tahun 2015 terlihat nampak keseriusan tersebut.

Namun entah kenapa dalam perjalanannya, upaya Perpusnas terlihat kurang *gerget* dalam penerapan RDA di Indonesia sehingga menyebabkan banyak program, kegiatan dan tahapan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik bahkan tidak tercapai sama sekali. Indikator termudah dalam melihat menurunnya keseriusan Perpusnas dalam penerapan RDA di Indonesia adalah sampai saat ini Katalog Induk Nasional (KIN) masih belum berbasis RDA, belum terlaksananya kopi katalog (*Copy Cataloguing*), dan *Interoperabilitas* katalog berbasis RDA antarperpustakaan se-Indonesia padahal batas waktu penerapan RDA di Indonesia akan berakhir pada tahun 2020.

Faktor yang menjadi Kendala Penerapan RDA di Indonesia

Irham Hanif Nabawi dalam tesisnya “Kesiapan Perpustakaan Nasional RI dalam Penerapan *Resource Description And Access* (RDA) di Indonesia” mengemukakan bahwa banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan RDA di Indonesia, di antaranya:

- a. Penerapan RDA sebagai peraturan pengatalogan baru bagi pustakawan dianggap sebagai lompatan pemikiran karena hal tersebut belum didapatkan pada bangku kuliah dan untuk memahaminya harus mempelajari FRBR. Konsep baru RDA yang berbeda dari konsep AACR2 yang telah akrab dengan mereka sebagai kendala karena mereka belum pernah mendapatkannya pada bangku kuliah, jadi mereka harus berusaha memahaminya melalui diskusi dengan teman-teman pustakawan.
- b. Problem bahasa asing, konsep baru RDA umumnya tersedia dalam bahasa Inggris masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga pustakawan mengalami kesulitan untuk memahami secara utuh isi dari materi pedoman RDA yang berukuran tebal, dan banyak memuat istilah baru yang jauh berbeda dengan istilah yang biasa digunakan ketika menggunakan pedoman AACR2 yang sudah ada terjemahannya meskipun masih sederhana.
- c. Ada kekhawatiran dari pustakawan mengenai ketidaksamaan persepsi terhadap kebijakan RDA dan pelaksanaannya diantara para pejabat di sejumlah eselon. Kekhawatiran itu wajar karena Perusnas merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terdiri dari 4 unit eselon satu, 9 eselon dua. Tentunya memiliki tugas dan kepentingan masing-masing sehingga sangat dimungkinkan memiliki perspektif sendiri mengenai penerapan RDA di Indonesia sesuai dengan tugas dan kepentingan masing-masing.
- d. Koleksi Perpusnas lebih dari satu juta judul, tentunya dalam melakukan rekatalogisasi dari AACR2 menjadi RDA akan terkendala dengan jumlah SDM (pustakawan) yang terbatas dan memerlukan dana yang sangat besar.
- e. Permasalahan lainnya adalah dukungan aplikasi, konsep baru RDA meskipun masih berkaitan dengan konsep AACR2 tetapi membutuhkan modifikasi pengembangan sistem IT yang menyesuaikan dengan kebutuhan

pedoman baru RDA atau bahkan mungkin membangun sistem IT yang baru yang sesuai dengan kebutuhan RDA.

Kendala tersebut di atas menjadi sebab mengapa tahapan penerapan RDA di Indonesia yang dilakukan Perpusnas tidak berlangsung secara mulus dan lancar seperti yang dilakukan dan dialami oleh NLB Singapura sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan dalam mengatasi hal tersebut. Seperti yang ditekankan oleh Choi, Yusof dan Ibrahim dalam tulisannya "*RDA: National Library Board Singapore's Learning Journey*" mengemukakan bahwa memahami apa RDA sebenarnya, perubahan yang diperlukan untuk rekod MARC, dan arah menuju aksesibilitas yang lebih. Oleh karena itu, pelatihan dalam memahami pedoman katalogisasi baru (RDA) diwajibkan untuk semua. Ini untuk memastikan bahwa semua staf dan pustakawan berada dalam pemahaman yang sama mengenai RDA, dan konsisten dalam penerapan prinsip dan standar RDA.

Alternatif kebijakan tersebut antara lain memastikan bahwa para pustakawan memahami struktur yang melingkupi konstruksi RDA karena struktur memiliki sifat imperatif yang harus dilakukan. Selain itu Perpusnas perlu mengaktifkan jaringan kerjasama antarperpustakaan dengan perguruan tinggi sehingga perkembangan terkini mengenai RDA dapat *terupdate* keseluruhan lapisan baik praktisi maupun akademisi. Memastikan fasilitas pendukung berupa ketersediaan dana dan kesiapan aplikasi untuk memastikan bahwa penerapan RDA dapat berjalan dengan baik. Terakhir, perlu adanya komitmen di kalangan pimpinan pada semua jenis perpustakaan.

5. PENUTUP

Ada pepatah yang mengatakan "*Di dunia ini tidak ada yang kekal, semua pasti berubah. Dan hanya perubahan itu sendiri yang abadi*". Dunia perpustakaan adalah bidang yang paling dinamis karena berhubungan dengan informasi yang perkembangannya bukan hanya dalam hitungan hari tetapi dalam hitungan menit bahkan detik.

Perubahan standar pengatalogan dari AACR2 ke standar pengatalogan baru RDA bukanlah sekedar perubahan teknis pengelolaan sumber informasi melainkan perubahan paradigma, yaitu pendekatan terhadap perilaku pemustaka dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan tuntutan perkembangan lingkungan global

menuju informasi dalam bentuk digital. Penerapan RDA bagi dunia perpustakaan adalah harus dan tidak bisa ditawar. Penerapan RDA memungkinkan melakukan kopi katalog (*Copy Cataloguing*), dan *Interoperabilitas* makamenetapkan RDA berarti meningkatkan efektifitas dan efisiensi baik waktu maupun biaya.

Terkendalanya penerapan RDA di Indonesia yang dimotori oleh Perpustakaan Nasional menunjukkan adanya ketidakteraturan pemahaman mengenai RDA baik secara personal maupun secara institusional sehingga mengganggu hal teknis lainnya. Masih ada waktu satu tahun sampai akhir 2020 untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada hal yang mustahil dan semua bisa dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penerapan RDA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ducheva, Dilyana P., Pennington, Diane Rasmussen. (2017). *Resource Description and Access in Europe: Implementations and perceptions*. Journal of Librarianship and Information Science, 1-16, DOI: 10.1177/0961000617709060
- Fahrul Rozi, Ardoni. (2012). *Analisis perbedaan AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules 2nd Edition) dan RDA (Resources Description and Access)*. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Vol. 1, No. 1, September 2012, Seri C, 242-254
- Irham Hanif N. (2016). *Kesiapan Perpustakaan Nasional RI dalam Penerapan Resource Description And Access (RDA) di Indonesia*. Masters Thesis, Universitas Indonesia
- Kathy Choi, Haslinda Md Yusof & Fauziah Ibrahim. (2014). *RDA: National Library Board Singapore's Learning Journey, Cataloging & Classification Quarterly*, 52:6-7, 608-620, DOI: 10.1080/01639374.2014.891165
- Keenan, T. M. (2014). *Resource description and access: cataloging standards affect reference service*. Reference Services Review, 42(3), p. 446-466.
- Kottman, M. (2012). *RDA and the Copy Cataloger*. Kansas Library Association College and University Libraries Section. 2, p.24-28. Kansas: CULS Proceedings.
- Oliver, Chris. (2010). *Introducing RDA : a guide to the basics*. Chicago : ALA
- Perpustakaan Nasional RI. (2015). *Kebijakan Penerapan Resource Description and Access (RDA) di Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharyanto. (2014). *Kajian komparatif atas penggunaan AACR2 dan RDA dalam format MARC21 terhadap bahan perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI